



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI WIJA HASAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **198244**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.700.000.000**

1. Bangunan Seluas 143 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 19996 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 19996 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 19990 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 16679 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 49998 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 2.500.000.000
7. Tanah Seluas 9990 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 264.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 1981, WARISAN Rp. 30.000.000
3. LAINNYA, SANTA CRUZ SEPEDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



4. LAINNYA, KONA SEPEDA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. MOTOR, KAWAZAKI LX 150C - KLX / TRAIL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	304.441.150
F. HARTA LAINNYA	Rp.	12.000.000
Sub Total	Rp.	8.323.441.150
III. HUTANG	Rp.	605.295.639
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.718.145.511

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.